

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEPRES NO. 174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI DALAM KASUS PEMBUNUHAN

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Sarjana Strata Satu Ilmu syariah**

**Oleh
Muhammad Hariri
NIM: CO3205021**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2010**

Gajah Belang


- Jl. Jemur Wonorejo Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407
- Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Hariri (NIM C03205021)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2010

Pembimbing


Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Hariri (C03205021)** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

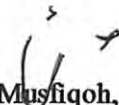
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



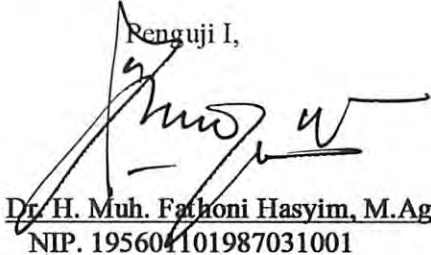
Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,



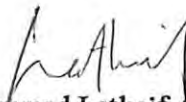
Siti Musfiqoh, MEI.
NIP. 197608132006042002

Penguji I,




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195604101987031001

Penguji II,



Muhammad Lathoif Ghozali, MA.
NIP. 197511032005011005

Pembimbing,




Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 15 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kategori kasus-kasus pembunuhan yang mendapatkan remisi menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan di analisis dengan teknik deskriptif analisis, kemudian menganalisis data yang tertata dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kepres No 174 Tahun 1999 tentang remisi dalam kasus pembunuhan menurut hukum pidana Islam, bahwa: Pertama, tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi, memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dengan masa hukuman sementara. Untuk masa hukuman seumur hidup dapat di ubah dengan pidana sementara, apabila sudah melalui prosedur yang berlaku. Kedua, pelaksanaan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan harus melalui proses di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini layak atau tidaknya tergantung dari tingkah laku Narapidana dan Anak Pidana untuk diberikan pengurangan masa tahanan. Ketiga, ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi sama halnya dengan pemaafan sebagai ganti dari *qisas* yang diberikan kepada pelaku pembunuhan, dengan alasan adanya kesempatan orang untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya, karena pemaafan adalah perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemegang otoritas pemberian remisi, disarankan agar kiranya Kepres No 174 Tahun 1999 tentang remisi dibuat acuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan memperbaiki diri sehingga pelaku pembunuhan dapat diterima oleh masyarakat luas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	KATEGORI KASUS-KASUS PEMBUNUHAN YANG MENDAPATKAN REMISI MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO.174/TAHUN 1999 TENTANG REMISI	17
A.	Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	17
1.	Pengertian Pembunuhan	17
2.	Macam-macam Pembunuhan.....	18
3.	Sanksi Qisas.....	20
B.	Pembunuhan Menurut Hukum Positif	29
1.	Pengertian Pembunuhan	29
2.	Kejahatan Terhadap Nyawa	30
3.	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan	34
C.	Kategori Kasus-Kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi	36
1.	Pengertian Remisi.....	36
2.	Macam-macam dan Besarnya Remisi.....	36
3.	Kategori Pembunuhan Yang Mendapatkan Remsi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi ..	38
BAB III	PELAKSANAAN REMISI BAGI PELAKU KASUS PEMBUNUHAN MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI	42
A.	Dasar Pemberian Remisi	42
B.	Syarat-Syarat Pemberian Remisi	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya hukum pidana dan kegunaannya bermaksud agar masyarakat dan setiap orang anggota masyarakat dapat dilindungi hukum pidana, serta untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan perlindungan hukum pidana bagi masyarakat dan anggotanya itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsidier hukum pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.¹

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang harus atau yang diperbolehkan atau yang diajarkan. Dengan adanya hukum dapat diketahui adanya garis pembeda antara apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan apa yang bersifat anjuran.

Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan

¹ Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 52

Upaya pelaksanaan pidana penjara baru yang didasarkan prikemanusiaan dengan cara memperluas usaha kelonggaran pidana untuk menjauhkan pengaruh buruk tembok penjara. Berbagai alternatif dari upaya baru tersebut berupa bentuk pidana bersyarat, cuti bersyarat, serta peningkatan remisi, dan sosial lainnya sampai bentuk pidana penjara di tempat terbuka. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan pendekatan pembinaan di dalam masyarakat serta lingkungannya. Berbagai usaha pembinaan yang mengandung unsur bimbingan dan keterampilan yang bersifat edukatif, korektif, dan defensif serta mencakup aspek individu dan sosial.⁵

Dalam kasus pembunuhan pun hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana yang diperkenankan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

[illegible]

فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.(Q.S al-Baqarah ayat 178)*⁶

Namun, asas pemaafan ini tidak dilakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan sosial, terutama pihak-pihak yang bersangkutan dengan peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh, sehingga tidak terjadi dendam kesumat serta terjaminnya rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Dalam hukum pidana hal ini sering kali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk menolak hukum Islam, serta menilainya sebagai hukum barbar dan kejam tidak berprikemanusiaan.⁷

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* dibolehkan menurut kesepakatan para *Fuqahā'*, bahkan lebih utama dibandingkan pelaksanaannya.⁸ Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.⁹

Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak *qisās*. Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Imam Abu Ḥanifah, Imam Syafi'i, Imam Aḥmad, pemilik *qisās* adalah semua ahli waris. Akan tetapi, menurut Imam Maliki, hak *qisās* dimiliki oleh *asabah* laki-laki yang

⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 28

⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, hal. xx

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 160

⁹ *Ibid.*, hal. 161

paling dekat derajatnya dengan korban, dan perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Alternatif memberikan ampunan diserahkan pada wali terbunuh. Mereka adalah ahli waris dari si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukum *qisās* atau memberi ampun, seandainya ada salah satu di antara mereka memaafkan, maka gugurlah *qisās* itu, sebab ia adalah salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.¹¹

Muhammad Ibnu Ḥasan, pengikut Imam Abu Ḥanifah, meriwayatkan bahwa Umar Ibnu al-Khaṭṭab ra. Dihadapkan seorang laki-laki yang telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Kemudian Umar memerintahkan agar ia dihukum mati, tetapi sebagian dari wali si terbunuh memaafkannya. Umar tetap memerintahkan agar ia dihukum mati. Abdullah Ibnu Mas'ud berkata:” jiwa si korban adalah milik mereka bersama; dikala orang lain (salah satu dari keluarga korban) memberi maaf, maka berarti ia telah menghidupkan satu jiwa. Oleh karena itu haknya untuk menuntut *qisās* (yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang tidak memberi maaf) tidak akan direalisasikan kecuali hak yang lain dicairkan terlebih dahulu. Lalu sahabat Umar bertanya kepadanya: “ kalau demikian bagaimana pendapatmu?” sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: “hendaknya membebaskan *diyat* pada hartanya (pembunuh), dan anda tidak

¹⁰ *Ibid.*, hal. 162

¹¹ H.A.Ali, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, juz 10 hal. 44

memberikan bagian terhadap (wali) yang memberi maaf“. Umar menyambutnya:

“Aku pun berpendapat demikian “

Muhammad (perawi) berkata: “ Saya pun sependapat”.¹²

Dan Ḥadis nabi yang berbunyi:

عن عطاء بن أبي ميمونة (قال : لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك) قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء في القصاص إلا امر به بالعفو (رواه أبي داود و ابن ماجه)¹³

Artinya: dari ata' ibn abi maimunah (berkata: saya tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Anas ibn mālik) berkata: sepengetahuan saya setiap ada perkara qisās dilaporkan kepada rasulullah saw; maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan"(HR. Abi Daud dan Ibn Majah)

Di dalam ḥadis Nabi diatas dijelaskan dari riwayat Anas Ibn Malik, ia berkata: sepengetahuan saya setiap ada perkara *qisās* dilaporkan kepada rasul, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan.¹⁴

Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dari si korban atau keluarganya sangat didorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh tidak dikenai hukuman. Sanksinya diserahkan kepada *Uli'l Amri*, soalnya si pembunuh ini telah melanggar dua hak (adami) dan hak masyarakat/jamaah/Allah.¹⁵

¹² *Ibid*, hal. 45

¹³ Abi Daud Sulaiman Ibn Asyās, *Sunan Abi Daud*, Juz II hal. 169 dan Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II hal. 99

¹⁴ H.A .Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hal. 157

¹⁵ *Ibid*, hal. 157

Dari ḥadīṣ yang telah diriwayatkan oleh sahabat Anas Ibn Malik bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita untuk memaafkan setiap orang yang melakukan atau mendapatkan hukuman *qisās* agar mereka dimaafkan untuk menghindari balas dendam yang makin melebar pada diri kita dan pada orang lain.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar dalam pengkajian permasalahan pokok yang diteliti lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori kasus-kasus pembunuhan yang mendapatkan remisi menurut keputusan presiden RI No.174/ Th.1999 tentang remisi?
2. Bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan menurut keputusan presiden RI No.174/ Th. 1999 tentang remisi?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan satu skripsi yang berkaitan dengan remisi bagi nara pidana menurut hukum pidana Islam.¹⁶ Akan tetapi peneliti sebelumnya menggunakan Kepres No 5 Th 1989 tentang remisi dan penulis menggunakan kepres No.174 Th.1999 tentang remisi. Di samping itu juga pembahasan yang difokuskan pada skripsi saudara Sjaihul Ghulam tersebut bagi nara pidana pada semua kasus, sedangkan yang akan penulis bahas cuma pada pemberian remisi bagi kasus pembunuhan. Dengan kata lain pembeda antara skripsi yang terdahulu dengan skripsi yang penulis buat terletak pada pemberian remisi, kalau skripsi terdahulu remisi bagi narapidana semua kasus, sedangkan skripsi ini di fokuskan hanya pada kasus pembunuhan saja.

Mengenai kajian hukum pidana Islamnya, penulis akan menambahkan atau mengurangi apa yang sudah dibahas oleh penulis sebelumnya, agar pembahasan yang penulis hasilkan dapat dibuat acuan dalam mempelajari ilmu hukum tentang remisi menurut pandangan hukum pidana Islam.

¹⁶ Sjaiihul Ghulam, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana*, Fakultas Syari'ah Jurusan MJ, Tahun 1989.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna, dalam penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

1. Aspek keilmuan (teoritis),yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya

dapat dijadikan sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam, lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang pelaksanaan remisi dalam hukum pidana Islam.

2. Aspek terapan, yakni sebagai bahan acuan dalam menerapkan hukum pidana Islam terlebih bagi para ulama' *fiqih jinayah* dan juga untuk diajarkan pada fakultas yang mempelajari tentang hukum Islam.
3. Sebagai pendorong ulama' dan sarjana Islam untuk membahas masalah-masalah agama yang berkembang pada saat ini.
4. Sebagai bahan pengembangan pengkajian dan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah pandangan hukum pidana Islam tentang remisi.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan makna-makna yang terkandung dalam judul di atas, maka sebaiknya penulis akan merinci satu persatu dan memperjelas maksud-maksud dengan mendeskripsikan istilah-istilah penting dalam judul yang mengarah pada penelitian ini.

Adapun definisi operasionalnya yang perlu di jelaskan adalah:

1. Kepres No. 174 /Th 1999: keputusan presiden tentang remisi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ABDURRAHMAN WAHID dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri atas:

- ## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dimana data akan digali, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer.

Data primer yang diperoleh, antara lain:

- 1) Keppres No. 174/Th 1999 tentang remisi
- 2) Pasal 4 ayat (1) dan pasal 14 undang-undang dasar 1945.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614)
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan N0.M.09.02-01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang remisi.

b. Sumber Sekunder

Data sumber sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah di atas, antara lain:

- 1) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bambang Purnomo.
- 2) *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz VI, Wahbah az-Zuhayliyy.
- 3) *at-Tasry' al-Jinay al-Islamiy*, juz II, Abdul Qadir Audah.

3. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif Analisis untuk memaparkan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Dengan metode ini peneliti berusaha menjelaskan fakta-fakta yang berupa data-data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan menurut kepres RI No 174 Th 1999 tentang remisi, kemudian menganalisis data yang tertata dengan pola pikir deduktif, yakni menjadikan suatu dasar atau teori umum sebagai pijakan dalam menarik penelitian terhadap masalah yang bersifat khusus sehingga dapat ditemukan kebenaran menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama: merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab ketiga: membahas tentang penguraian data-data, yang di ambil pada kepres tentang remisi yang mencakup kapan pelaksanaan remisi, bentuk-bentuk remisi, dan syarat-syarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang berhak mendapatkan remisi.

remisi dan pelaksanaan pemberian remisi.

Pada bab kelima: merupakan bab penutup sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dari bab-bab yang terdahulu serta berisikan tentang saran-saran.

**KATEGORI KASUS-KASUS PEMBUNYAN YANG MENDAPATKAN REMISI
MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 174/TAHUN 1999 TENTANG
REMISI**

1. Pengertian Pembunuhan

Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya اَمات artinya mematikan.

Dalam arti istilah, pembunuh didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut.

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.²²

القتل هو فعل من العباد تزول به الحيات ای انه ازهاق روح ادمی بفعل ادمی آخر

²² Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI, hal. 217

yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.²³

2. Macam-macam pembunuhan

a. Sengaja (*al-‘Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia mengendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggung jawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.

b. Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdi*)

Hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para *Fuqahā'*. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian *syibhul ‘amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindakan pidana pembunuhan, ukuran *syibhul ‘amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang di gunakan itu bukan alat yang biasa (*galib*) untuk membunuh, maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai

²³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasry' al-Jinay al-Islamy, juz II*, hal. 6

sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (*al-khaṭa'u*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada dua macam :

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang lain.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kalalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, seperti seseorang yang menggali parit ditengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak

memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.²⁴

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

3. Sanksi *Qiṣāṣ*

a. Hukum *Qisās*

1. Haram melakukan pembunuhan.

Q.S an-Nisā' ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukannya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S an-Nisā' ayat 93)²⁵

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, hal. 77-

²⁵ Departemen Agama, *al-Our'an Dan Terjemahannya*, hal. 94

Dan Q.S al-Isrā' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S al-Isrā' ayat 33)*²⁶

2. Orang mendahului pembunuhan, menanggung dosa orang yang mengikuti pembunuh itu. Dinyatakan dalam hadis Nabi saw.

عن الأعمش , عن عبد الله بن مرة , عن مسروق , عن عبد الله , قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابني
ادم الاول كفل من دمها لانه كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل
(رواه البخاري و مسلم)

*Artinya: Dari a'was, dari abdillah ibn murras, dari masruq dari abdillah berkata: rasulullah saw berkata: " tidaklah seorang di bunuh kecuali sebagai pertanggungjawaban darahnya yang mengalir atas anak adam yang pertama, karena dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan(H.R. Bukhari Muslim)."*²⁷

3. Orang melakukan pembunuhan sengaja Imanya dangkal.

عن عقيل عن إبنی شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن

²⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 286

²⁷ Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusairiy an-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II hal. 100

ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari 'uqail, dari ibn syihab, dari abi bakri ibn abdur rahman , dari abi hurairah sesungguhnya Rasulullah berkata:” Tidaklah seorang akan berzina ketika ia melakukannya dia sebagai mukmin, dan tidaklah seorang akan mencuri ketika ia melakukannya dia sebagai orang mukmin, dan tidaklah seseorang akan minum-minuman keras ketika ia melakuannya dia sebagai orang mukmin, dan tidak pula seseorang akan membunuh apabila ia seorang mukmin(H.R. Bukhari Muslim).²⁸

b. Macam-macam Qisās

1. *Qiṣās* jiwa, dalam *qiṣās* ini adalah penghilangan nyawa orang lain yang menjadi tujuan utamanya.
2. *Qiṣās* anggota badan, dalam *qiṣās* ini pelaku melakukan penganiayaan terhadap tubuh seseorang yang tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain.

c. Syarat-syarat *Qisās*

1. Orang yang terbunuh dilindungi darahnya.

Andaikata yang dibunuh adalah orang kafir *ḥarbi*, orang yang *zina muḥṣan*, atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggung jawab, tidak di *qiṣās* dan tidak membayar *diyat*, sebab mereka adalah orang yang tersia-sia darahnya.

2. Balig

Hukum *qisās* tidak dikenakan terhadap anak kecil, karena anak kecil

²⁸ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, Juz VIII hal. 13

kemudian dibebaskan dari hukuman.³¹

4. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih.

Sebab seandainya ia dipaksa berarti hak miliknya tercabut, tanggung jawab tidak dibebankan terhadap orang yang hilang hak memilihnya. Syarat ini dikemukakan oleh kelompok Ḥanafiah, kecuali Imam Zufar. Dengan demikian, menurut mereka tidak ada hukuman qīṣāṣ bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Menurut jumhur ulama' termasuk Zufar, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan hukuman.³²

5. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh.

Orang tua tidak di*qiṣāṣ* sebab membunuh anaknya atau cucunya sekalipun disengaja. Berbeda bila mana anak membunuh salah satu dari orang tuanya, maka secara konsensus ia wajib dihukum mati, sebab orang tua penyebab dari kehidupan anak, oleh karena itu sang anak tidak boleh membunuh atau merenggut nyawa orang tuanya.

6. Pembunuh dan terbunuh sederajat.

Kesamaan derajat ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. Orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak *dqiṣās*, karena dalam hal ini tidak ada kesamaan derajat antara yang membunuh dan yang dibunuh. Lain halnya dengan

³¹ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI hal. 265

³² *Ibid.*, hal. 266

orang kafir membunuh orang Islam atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, keduanya di*qisās* karenanya.

7. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum *qisās* atasnya.

Bilamana ada orang lain membantunya dalam pembunuhan, di antara orang-orang yang tidak wajib terkena hukum *qisās*. Seumpama dalam suatu pembunuhan terjadi kerja sama antara orang yang membunuh kesengajaan dan orang yang membunuh kesalahan, atau orang mukallaf dengan binatang buas, atau orang *mukallaf* dengan orang bukan *mukallaf* seperti anak kecil dan orang gila. Maka tidak wajib dilasanakan hukum *qisās* terhadap salah satu diantara keduanya. Sebagai gantinya mereka membayar *diyat*, karena adanya keraguan yang dengannya hukum had bisa terhapus. Alasannya ialah bahwa pembunuhan itu tidak bisa dibedakan, yang ada kemungkinan terjadinya dari akibat perbuatan orang yang tidak wajib atasnya hukum *qisās*. Sebagai mana pembunuhan itu mungkin pula diakibatkan oleh perbuatan orang yang memenuhi persyaratan hukum *qisās*. Dan apabila hukum *qisās* gugur maka yang wajib adalah penggantinya, yaitu *diyat*.

d. Hapusnya Hukuman *Qisās*.

1. Hilangnya objek *qisās*.

Objek *qisās* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa)

pelaku (pembunuh). Apabila objek *qisās* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qisās* menjadi gugur.

2. Pengampunan.

Pengampunan terhadap *qisās* diperbolehkan menurut kesepakatan para *Fuqahā'*, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan dengan secara lisan atau secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafadz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan lain sebagainya.³³

3. *Sulh* (perdamaian).

Melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari *diyat*. Dan orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah, orang yang berhak atas *qiṣās* dan pemaafan.

Sulh (perdamaian) ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemiliknnya maupun dalam pengaruh atau hakikat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan *qisās*. Perbedaan dengan pengampunan adalah pengampunan itu pembebasan *qisās* tanpa imbalan, sedangkan *sulh* adalah pembebasan dengan imbalan.³⁴

4. Diwarisnya hak *qisās*.

³³ Wardi Muslikh, *Hukum Pidana Islam*, hal. 161

³⁴ *Ibid.*, hal. 164

Qisās juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga, karena adanya wali korban yang menjadi pewaris hak *qisās*, seperti pembunuh yang meninggal dunia terus peng*qisās*annya digantikan oleh ahli waris seperti anaknya.

e. Pidana penjara dalam hukum pidana Islam

Pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sendiri merupakan hukuman yang di jatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang di tentukan oleh syariat Islam, yaitu hukuman *hudūd*, *qisās* dan *diyat*.³⁵ Sedangkan hukum *qisās* dan *diyat* merupakan hukum yang ada nashnya seperti: hukuman bagi pezina, pencuri, dan pembunuh.

Hukuman kawalan sebagai suatu alternatif dari hukuman *ta'zir* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Hukuman kawalan dalam waktu terbatas.

Hukuman kawalan waktu terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama' berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan, di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 299

dibunuh oleh orang ketiga, atau orang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati di makan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).³⁹

kejahatan ini adalah nyawa manusia. Ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah yang dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350.

Kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai suatu keinginan untuk berbuat tidak baik, dalam kesengajaan gerakan yang ditimbulkan karena refleksnya pelaku. Sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.⁴²

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditunjukan dalam tiga hal perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ihwal yang menyertai perbuatan pidana.⁴³

Teknis pembunuhan ini dinamakan *delik material*, di mana kejahatan baru dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi, tidak dirumuskan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan di atas disebut ”pembunuhan biasa” dalam bahasa asing dinamakan “doodslag” di mana diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam

⁴² Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 172

⁴³ Bambang Purnomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, hal. 156

niat pembuat.⁴⁴

Di samping itu pembunuhan tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak dipikir-pikir lebih panjang misalnya A sekonyong-konyong datang di rumah melihat bahwa isterinya sedang berzina dengan si B. Karena panas hati, timbul maksudnya untuk membunuh isteri dan si B itu, yang seketika itu maksud itu dilaksanakan, ia mencabut pistolnya yang ia bawa sebagai petugas Negara.⁴⁵

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah dimuat dalam bab XXI pasal 359.

Kematian korban tidak dimaksudkan pada pasal 338 melainkan pasal 359. Teknik pembunuhan ini dinamakan delik *culpa*, pembunuhan ini disebut demikian karena salahnya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menyebabkan matinya orang lain.

Rumusan “karena salahnya” adalah unsur “kelalaian” atau *culpa* yang menurut hukum pidana terdiri atas:

- 1) *Culpa* dengan kesadaran
- 2) *Culpa* dengan tanpa kesadaran⁴⁶

Van Hamel menolak pembagian *culpa* yang disadari dan tidak

⁴⁴ R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, hal. 149

⁴⁵ *Ibid.* hal. 150

⁴⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, hal. 64

dan lainnya.⁴⁸

Jongkers, memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi di tempat itu ia mengetahui ada orang sakit yang sedemikian rupa sehingga akan meninggal apabila terkejut. Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaan ditujukan kepada kematian orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari bahwa si pelaku sadar akan hal yang pasti bisa membunuh dan dia menghindari, akan tetapi terjadi pula kematian orang lain. Lain halnya dengan kealpaan yang tidak di sadari ia mengira bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan kematian orang lain, akan tetapi setelah kejadian ternyata perbuatannya telah menghilangkan nyawa orang lain.⁴⁹

3. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan.

a. Penbunuhan sengaja

- 1) Pembunuhan pasal 338
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- 3) Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau

⁴⁸ *Ibid*, hal. 152

⁴⁹ R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-deik Khusus*, hal.

kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan di lakukan.

b. Pembunuhan tidak sengaja

1) pembunuhan karena kesalahan pasal 359, dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun.

C. Kategori Kasus-kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diindonesia.

Remisi menurut kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada pasal 1 remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga negara indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa memberikan yang seharusnya diberikan kepada terpidana dengan adanya remisi tersebut biar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat.

2. Macam-macam dan besarnya remisi

a. Macam-macam remisi

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
 2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang di anut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
 3. Remisi tambahan, apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵⁰
- b. Besarnya remisi
1. Besarnya remisi umum
 - a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
 2. Besarnya remisi khusus
 - a). 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah

⁵⁰ Keputusan presiden RI No 174 Th 1999 Tentang Remisi Pasal 2-3

menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

- b). 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

3. Remisi tambahan

- a). Satu perdua dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- b). Satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membuat kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.⁵¹

3. Kategori Kasus-kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi.

Di atas dijelaskan tentang beberapa pembunuhan yang mendapatkan masa hukuman yang berbeda-beda, semisal hukuman sementara dengan masa tahanan minimal 1 hari sampai hukuman tahanan dua puluh tahun, dan ada juga pembunuhan yang mendapatkan masa hukuman seumur hidup. Bagaimanapun hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan tidak boleh

⁵¹ Keputusan presiden RI No 174 Th 1999 Tentang Remisi Pasal 5-6

suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 340, Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁵⁶

⁵⁶ Moeljatno, *KUHP*, hal. 123

**PELAKSANAAN REMISI BAGI KASUS PEMBUNUHAN
MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 174 TAHUN 1999
TENTANG REMISI**

1. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (pasal 14).
2. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh menteri hukum dan HAM melalui kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM, adalah hak setiap orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, atau cabang rumah tahanan. Pemberian remisi bagi narapidana, anak

matinya orang lain. Kemungkinan lain jika perbuatan pidana pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja akan dianggap sebagai penganiayaan berat yang menimbulkan matinya orang lain.

Menurut R.Sursilo yang dimaksud dengan perbuatan pidana pembunuhan adalah “perbuatan yang mengakibatkan orang lain”. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Dari keterangan yang disebutkan di atas bahwasannya pembunuhan yang mencakup pidana sementara adalah pembunuhan yang sudah dijelaskan di KUHP mulai pasal 338 sampai pasal 349, akan tetapi mengecualikan pasal 339 dan 340 karena pidana di situ sifatnya bukan sementara melainkan bersifat pidana seumur hidup, bahkan bisa juga terkena hukuman pidana mati dengan alasan pembunuhannya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan pidana yang bersifat sementara antara lain adalah:

1. Pembunuhan pasal 338 .
2. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
3. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
4. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan

remisi diberikan pada Narapidana dan Anak Pidana sebagai berikut:

a. Remisi umum

1. Tahun pertama apabila telah menjalani 6 bulan sampai dengan 12 bulan, besarnya remisi 1 bulan.
2. Tahun pertama apabila telah menjalani lebih dari 12 bulan, besarnya remisi 2 bulan.
3. Tahun kedua, besarnya remisi 3 bulan.
4. Tahun ketiga, besarnya remisi 4 bulan.
5. Tahun keempat, besarnya remisi 5 bulan
6. Tahun kelima, besarnya remisi 5 bulan.
7. Tahun keenam, besarnya remisi 6 bulan.
8. Tahun ketujuh dan seterusnya, besarnya remisi 6 bulan.

b. Remisi khusus

1. Tahun pertama apabila telah menjalani pidana 6 bulan sampai dengan 12 bulan, diberikan remisi sebesar 15 hari.
2. Apabila telah menjalani 12 bulan atau lebih, diberikan remisi sebesar 1 bulan.
3. Tahun kedua dan ketiga, diberikan remisi sebesar 1 bulan.
4. Tahun keempat dan kelima, diberikan masing-masing 1 bulan 15 hari.
5. Tahun keenam dan seterusnya, diberikan remisi 2 bulan.

2. Pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan dengan pidana seumur hidup.

Setelah dijelaskan yang lebih terperinci bahwa pembunuhan apa saja yang bersifat sementara dan bersifat seumur hidup, maka penulis akan menjelaskan, di dalam KUHP pidana bagi pelaku pembunuhan yang bersifat pidana seumur hidup bagi si pelaku dijelaskan pada pasal:

1. Pasal 339, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2. Pasal 340, Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁶²

Pembunuhan yang menjerat pelaku dengan hukuman pidana seumur hidup, ketentuan-ketentuan dalam pemberian remisinya tertera pada pasal 9 ayat 1 sampai 4, akan tetapi dalam pemberian remisinya pelaku yang dihukum dengan pidana seumur hidup tidak berhak mendapatkannya kecuali

⁶² *Ibid.*, hal. 123

kepala LAPAS segera memerintahkan TPP daerah untuk melakukan sidang dalam membahas permohonan, apabila permohonan diterima, maka dalam jangka 14 hari segera meneruskan permohonan disertai data-data dan apabila ditolak, kepala LAPAS dalam jangka waktu 14 hari wajib segera memberitahukan penolakan kepada narapidana.

Setelah kepala LAPAS menerima permohonan tersebut, segera meneruskan kepada kepala kantor wilayah, dalam hal menyetujui usul kepala LAPAS, maka dalam jangka 14 hari, segera meneruskan usulnya kepada direktur jenderal pemasyarakatan, maka direktur jenderal pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 28 hari sejak diterimanya usulan dari kantor segera meneruskan kepada menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia meneruskan permohonan kepada presiden dengan disertai pertimbangannya.⁶⁴

Keputusan presiden tentang pemberian remisi bagi narapidana yang menjalani pidana seumur hidup menjadi pidana sementara setelah diterima oleh menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka salinannya diberikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman

⁶⁴*Ibid.* Pasal 4-9

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN

Di bab tiga diterangkan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan pengurangan masa hukuman, dengan syarat mereka telah memenuhi kriteria-kriteria dari pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Sebagaimana dalam Islam sendiri *al-Qur'an* telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artian mereka mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui kesalahan mereka.

[illegible]

orang-orang yang selalu melakukan kezaliman.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

*Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Q.S asy-Syūrā ayat 40)*⁶⁶

Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Akan tetapi Pemberian remisi yang dikemukakan oleh menteri kehakiman dan menteri hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang biasa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat.

Allah sendiri menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah, sebagaimana telah diterangkan dalam surah *al-Furqān* ayat 70

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S al-Furqān ayat 70)*⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 370

⁶⁷ *Ibid*, hal. 28

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangnya serta bermohon ampun kepada Allah, tidak mengulagi perbuatan yang pernah ia lakukan, kalau semua itu telah mereka penuhi niscaya Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka terbebaskan ancaman siksa bahkan akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan.

Dan diteruskan ayat seterusnya yakni ayat 71

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٦﴾

*Artinya: Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. (Q.S al-Furqān ayat 71)*⁶⁸

Bahwasannya Allah akan memberikan keanugerahannya *taufiq* dan *hidayah*, sehingga dari saat ke saat niat dan tekatnya untuk mendekat kepada Allah semakin kukuh dan amalnya akan semakin baik dan bertambah.

Di samping itu juga dalam surat *al-Mā'idah* dijelaskan, meskipun seseorang pernah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan terhadap orang lain dan mereka mau menjalankan pidananya sebagaimana mestinya pidana yang mereka terima dan mereka mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya karena Allah maha Pemurah lagi maha Penyayang.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 367

orang lain sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu kemanfaatan dari perbuatan itu. Semisal, ketika menentukan putusan hukuman terhadap orang yang bersalah, kita harus memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merubah segala perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat, seperti dorongan untuk meninggalkan perbuatannya atau kalau toh mereka terkena hukuman pidana, maka bagi penegak hukum harus memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti misalnya lembaga pemasyarakatan yang telah menaungi para narapidana untuk merubah kehidupannya agar setelah mereka keluar dari lembaga tersebut mereka dapat diterima oleh masyarakat, meskipun orang itu pernah melakukan perbuatan pidana.

B. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana pembunuhan.

Sanksi pidana dilahirkan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari hukum tersebut yaitu kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat. Pidana atau sanksi baik di hukum positif dan hukum Islam diterapkan meskipun dalam prakteknya tidak disenangi oleh yang tertimpa pidana tersebut. Melihat kondisi seperti ini maka pidana tersebut harus mempunyai nilai yang baik dan ideal antara lain:

1. Harus mampu mencegah seseorang melakukan maksiat atau mempunyai fungsi prefentif dan mampu menjerakan setelah perbuatan.
2. Memberikan hukuman kepada seseorang bukan berarti membalas dendam

Dalam keterangan pada ayat diatas sebagai anjuran untuk kita agar selalu memaafkan dan berbuat baik itu, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena perbuatan yang sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah.

[illegible]

1. Aplikasi pemaafan terhadap pidana pembunuhan.

Dalam bab dua dijelaskan bahwa pembunuhan termasuk pada jarimah *qisās* dan penerapannya menjadi hak ahli waris. Maka penerapannya ada beberapa kemungkinan seperti hukuman *qisās* bisa berupa diyat karena pemaafan dari saudara korban atau pemaafan yang diberikan pelaku pembunuhan tanpa adanya ganti rugi (*diyat*). Ada juga unsur pemaafan yang dilakukan oleh *Uli'l Amri* atau hakim. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa hukuman yang wajib bagi pembunuh adalah *qisās*, sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 178

Dalil tersebut secara tegas menyatakan bahwa hukuman *qisās* bagi pelaku pembunuhan adalah pasti. Logika dari penganggapan ini adalah jika wali korban memaafkan secara mutlak (tidak membayar *diyat*). Maka tidak ada kewajiban bagi pelaku membayar *diyat*, tetapi pembunuh dengan kesadarannya mnembayar *diyat* sebagai kompensasi pemberian maafnya wali dari si korban.

Dengan demikian, mereka (ahli waris) menginginkan memaafkan secara mutlak atau memaafkan dari *qisās* dengan membebani *diyat* kepada pelaku pembunuhan sebagai penggantinya tebusan, maka itu dibenarkan didalam al-Qur'an.⁷⁵

⁷⁵ M. Qurish, Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* vol 1 hal. 393

pedih.⁷⁷

Menurut H.A Jazuli memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dan atau pelukaan dari si korban atau keluarganya sangat di dorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh tidak kena hukuman. Sanksinya diberikan kepada *Ulii Amri*, karena si pembunuh melanggar dua hak yaitu hak perorangan dan hak masyarakat/jama'ah/Allah.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang kriteria pemaafan terhadap pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, itu dapat dilakukan apabila si korban atau ahli waris tidak melaksanakan hukuman *qisās*, artinya si korban atau ahli waris memaafkan dari hukuman *qisās* adapun kriteria pemaafan sebagai berikut:

- a. Si pemaaf harus mengatakan saya telah memaafkan,

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya, atau *lafaz* yang setara dengan perkataan itu.⁷⁹

- b. Si pemaaf harus berasal dari yang mempunyai hak, karena fungsinya menggugurkan hak. Sedangkan menggugurkan hak yang tidak

⁷⁷ M. Qurish, Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* vol 1 hal. 393

⁷⁸ H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* hal. 157

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 161

2. Aplikasi pemaafan terhadap keputusan hakim

Selain ahli waris hakim juga berhak melakukan menentukan pidana terhadap pelaku atau juga menimbang untuk memberikan pidana penjara atau mendapatkan pemaafan. Seorang hakim dapat melakukan hukuman apabila korban tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama, menurut kesepakatan *Fuqahā'*, masalahnya diserahkan kepada pemerintahan (*sulṭan*). Hal ini sesuai dengan *qaidah syar'iiyyah* yang bersumber dari Ḥadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فالسلطان ولي من لاوولى له

Artinya: Dari ibn juraij dari sulaiman dari az-zuhriy dari 'urwah dari 'aisyah sesungguhnya Rasulullah berkata: Maka sultan (pemerintah) adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali.⁸²

Hadis di atas menjelaskan ketika seorang terbunuh tidak memiliki ahli waris satu pun dari saudara sesama agama, maka pelimpahan diserahkan terhadap pemerintahan karena yang lebih mempunyai hak adalah pemerintahan tersebut.

Akan tetapi apabila *mustahiq qisās* itu masih di bawah umur atau gila, para ulama' berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama' Ḥanafiah, pelaksanaan hukuman qisās menunggu sampai ia dewasa atau sampai sembuh

⁸² Abi Isa Ibn Isa Ibn as-Saurah, *Sunan Tirmizi*, Juz 2, hal. 352

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi memiliki kriteria masing-masing, dalam artian pemberian remisi tergantung darimana hukuman, masa hukuman tergolong sementara atau tergolong pidana mati kalau pidananya sementara, maka akan mendapatkan remisi dengan syarat-syarat tertentu, kalau pidana dengan hukuman pidana mati, maka tidak bisa kecuali ada ketentuan yang lain.
2. Tata cara dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Menteri Hukum.
3. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sangat baik, karena dengan adanya remisi itu bisa menjadikan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya dan juga memberikan kesempatan pada pelaku pembunuhan untuk menghindari perbuatan itu lagi, dengan tujuan dan dorongan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian kepustakaan terhadap keputusan presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, maka penulis memberikan saran agar kiranya keputusan presiden itu meskipun sudah diatur remisi terhadap pembunuhan, kiranya dipilah-pilah juga remisi bagi pelaku setiap Narapidana semisal pencurian, korupsi dan lainnya.
2. Kiranya pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan lebih termotivasi dalam mengedepankan kemaslahatan bagi Narapidana, misalnya fasilitas pengajaran, serta keterampilan yang memadai agar mereka yang keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1995.
- Abi Daud Sulaiman Ibn Asyas, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dār al-Fikr, 1994.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Turmuzi*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2001.
- Bukhari, al, Abi Abdullah Muḥammad Bin Ismail, *Ṣaḥiḥ Buhari*, Juz VIII, Semarang, Toha Putra,tt.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Rajawali Press, 2000.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia,1985.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- H.A.Ali, *Terjemah fiqh Sunnah*, Jilid 10, Bandung, Al-Ma'arif, 1987.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Mawardi, al-, Abu Hasan Ali, *al-Aḥkām as-Sulṭaniyah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1960.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Muslich, Ahmad. Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Naiysabūri, an, Abil-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjaj Ibn Muslim al-Qusayriy -, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 1993.

Purnomo, Bambang, *kapita selekta hukum pidana*, Jogjakarta, Liberty, 1988.

-----, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985.

Qadir, al- Audah, Abdul, *at-Tasry' al-Jinaiy al-Islamiy, juz II*. Mesir, Maktabah Dār at-Taras, 2003.

Soesilo, R, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1984.

Shihab, M. Qurish, *Tafsir al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

S. Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Tresna, R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Unpad, 1994.

Zuhailiy, az, Wahhab, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.4 juz 6, Libanon, Dār al-Fikr, 2002.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, al-Hidayah, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya
Cetakan VI, 2008.

Lampiran-lampiran:

1. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 14).
2. Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

